

**PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
UMKM YANG TERDAFTAR PADA KANTOR WILAYAH
PAJAK JAKARTA UTARA**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

CARSEN FINRELY

NPM: 127212032

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANEGARA
JAKARTA
2022**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
UMKM YANG TERDAFTAR PADA KANTOR WILAYAH
PAJAK JAKARTA UTARA**



DIAJUKAN OLEH:

CARSEN FINRELY

NPM: 127212032

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANEGARA
JAKARTA**

2022

**PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
UMKM YANG TERDAFTAR PADA KANTOR WILAYAH
PAJAK JAKARTA UTARA**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:

Carsen Finrely

127212032

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Yuniarwati, SE, MM, Ak, CA, BKP

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Carsen Finrely
NPM (Nomor Pokok Mahasiswa) : 127212032
Program Studi : Pendidikan Profesi Akuntan
Alamat : Jl. Str Mas Tmr Raya A1/27
Hp. 0895343061899

Dengan ini saya menyatakan, apakabila dalam pembuatan tugas akhir ternyata saya:

1. Melakukan plagiat/menyontek;
2. Mengutip tanpa menyebutkan sumbernya;
3. Menggunakan data fiktif atau memanipulasi data;
4. Melakukan riset perusahaan fiktif (hal ini Jurusan Akuntansi/Manajemen dapat konfirmasi langsung ke perusahaan terkait sesuai dengan surat risetnya).

Saya bersedia dikenakan sanksi berupa pembatalan tugas akhir dan diskors maksimal 2 (dua) semester. Kemudian apabila hal di atas terbukti setelah lulus ujian tugas akhir/komprehensif saya bersedia dinyatakan batal tugas akhir dan kelulusannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 17 Desember 2022

Carsen Finrely

Catatan:

1. Asli dikembalikan ke jurusan Akuntansi/Manajemen dan difotocopy untuk mahasiswa yang bersangkutan.
2. Harap disertakan pada tugas akhir sebelum maupun setelah lulus ujian dan revisi.

ABSTRAK

PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM YANG TERDAFTAR PADA KANTOR WILAYAH PAJAK JAKARTA UTARA

Carsen Finrely, 127212032

Tax ratio Indonesia berada pada level yang lebih rendah dibandingkan negara-negara yang tergabung dalam G-20 dan ASEAN, pandemi Covid-19 menyebabkan Internal Service Revenue melakukan reformasi dari digitalisasi layanan administrasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Insentif pajak yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang terkena dampak Covid-19 diharapkan dapat meningkatkan norma subyektif masyarakat, khususnya tingkat kepatuhan wajib pajak sukarela individu UMKM. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di IRS Jakarta Utara, dan memiliki hipotesis bahwa norma subyektif, sosialisasi perpajakan dan pelayanan administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak orang pribadi UMKM. Hasil analisis data dengan Smart PLS 4.0 menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima dan didukung kecuali untuk sosialisasi pajak.

Kata Kunci: Covid-19, Reformasi, Norma Subyektif, Smart PLS 4.0, Pelayanan Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak, Tax Ratio, Sosialisasi Wajib Pajak

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF SUBJECTIVE NORMS, TAX SOCIALIZATION AND TAX ADMINISTRATION SERVICES TO MSMEs INDIVIDUAL TAX COMPLIANCE WHO REGISTERED AT NORTH JAKARTA REGIONAL TAX OFFICE

Carsen Finrely, 127212032

Indonesia's tax ratio is at a lower level compared to countries that are members of the G-20 and ASEAN, the Covid-19 pandemic has leads Internal Service Revenue to make a reform from digitizing tax administration services and tax socialization. Tax incentives provided for all Indonesian people who get affected by Covid-19 is expected to increase the subjective norms of the society, especially MSME individual's voluntary tax compliance level. This Study was conducted on individual MSME taxpayers registered at the North Jakarta IRS, and has a hypothesis that subjective norms, tax socialization and tax administration services have a positive and significant effect on the tax compliance of MSME individual taxpayers. The results of data analysis with Smart PLS 4.0, the result indicates that the hypothesis can be accepted and supported except for tax socialization.

Keywords: Covid-19, Reform, Subjective Norms, Smart PLS 4,0, Tax Administration Services, Tax Compliance, Tax Ratio, Taxpayer Socialization

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Yuniarwati, SE, MM, Ak, CA, BKP selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 17 Desember 2022

Carsen Finrely

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS AKHIR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
SURAT PERNYATAAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan.....	1
1. Latar Belakang Penelitian	1
2. Identifikasi Masalah	4
3. Pembatasan Masalah	5
4. Perumusan Masalah	5
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan	5
2. Manfaat	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Gambaran Umum Teori	8
B. Definisi Konseptual Variabel	9
C. Kaitan antara Variabel-variabel.....	15
D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Desain Penelitian.....	19
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel.....	21
C. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.....	22
D. Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Deskripsi Subjek Penelitian	32

B.	Deskripsi Obyek Penelitian.....	32
C.	Hasil Analisis Data.....	35
D.	Pembahasan.....	42
BAB V PENUTUP		45
A.	Kesimpulan	45
B.	Keterbatasan dan Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....		47

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Tabel Rasio Pajak Indonesia 2017-2022	2
Tabel III. 1 Pengukuran Skala Likert.....	20
Tabel III. 2 Tabel Operasionalisasi Variabel	23
Tabel III. 3 Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS	26
Tabel III. 4 Parameter Uji Model Struktural dalam Model Pengukuran PLS	28
Tabel III. 5 Tabel Hipotesis Statistik	31
Tabel IV. 1 Bagian Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	34
Tabel IV. 2 Statistik Deskriptif.....	36
Tabel IV. 3 Outer Loading.....	36
Tabel IV. 4 Average Variance Extracted.....	37
Tabel IV. 5 Fornell Larcker Criterion.....	38
Tabel IV. 6 <i>Cross Loading</i>	38
Tabel IV. 7 Cronbach Alpha & Composite Reliability	40
Tabel IV. 8 R2	40
Tabel IV. 9 Uji Signifikansi.....	41
Tabel IV. 10 Uji Hipotesis	42
Tabel IV. 11 Tabel F Square.....	43
Tabel IV. 12 SRMR	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Teori.....	18
Gambar III. 1 Diagram Jalur.....	30
Gambar VI. 1 Diagram Jalur Penelitian.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Penelitian

Revolusi sistem perpajakan Indonesia menjadi salah satu agenda pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19 melalui proses penciptaan kebijakan peraturan perpajakan, pengawasan dan layanan perpajakan bagi wajib pajak Indonesia. Negara berkembang seperti Indonesia dengan penerimaan yang terfokus pada penerimaan pajak nasional sebagai sumber dana untuk pemerataan pembangunan negeri, pajak merupakan kontribusi wajib orang pribadi dan/atau badan yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan Undang-Undang No. 16 pada Tahun 2009.

Self-assessment system yang dianut sebagai sistem atas perpajakan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dengan pemberian kewenangan kepada Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Pemberlakuan sistem ini adalah ikhtiar baik negara dalam mendorong peran aktif masyarakat dalam pemerataan pembangunan nasional.

Kehadiran prinsip sistem self-assessment berdampak pada pengurangan tanggung jawab beban pembuktian kepada aparatur sipil bidang perpajakan Indonesia dengan tujuan peningkatan efisiensi pekerjaannya dengan prinsip perhitungan oleh Wajib Pajak akan diyakini benar sampai pegawai kantor pajak dapat membuktikan sebaliknya dan/atau penemuan kesalahan perhitungan, penyetoran, pelaporan oleh Wajib Pajak.

Menurut Siahaan (2010) yang dikemukakan kembali oleh (Finrely & Ardiansyah, 2022), kelemahan dari penggunaan sistem self-assessment terletak pada tingginya tingkat penyalahgunaan dari pemberian kewenangan kepada Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban-kewajiban perpajakan yang dimilikinya,

tercermin dalam nilai tax ratio Indonesia periode 2021 dalam level 9,11% yang termasuk dalam kategori rendah.

Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa yang dimaksud oleh Wajib Pajak ialah Orang Pribadi atau Badan usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengukuran tingkat kepatuhan pajak di sebuah negara dapat dilakukan melalui perbandingan rasio pajak dari tahun ke tahun, nilai rasio pajak didapatkan dengan membandingkan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio pajak hanya akan dapat dicapai dengan maksimal seiring meningkatnya tingkat kepatuhan pajak sukarela, berikut tabel rasio pajak Indonesia 2017-2021 (Kircher, 2008):

Tabel I. 1 Tabel Rasio Pajak Indonesia 2017-2022

Tahun	Rasio Pajak (%)
2017	9,89
2018	10,24
2019	9,77
2020	8,33
2021	9,11

Diolah dari laporan Kementerian Keuangan.

Tabel rasio pajak diatas menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang buruk dimana nilai tersebut menempatkan Indonesia masuk pada zona bawah bila dibandingkan dengan negara G-20 dan Asean lainnya. Kedua hal ini melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana Pemerintah Indonesia percaya implementasi peraturan-peraturan perpajakan yang baru ini akan dapat meningkatkan rasio pajak Indonesia, di sisi lain, pandemik covid 19 menjadi pertunjukkan tersendiri bagi Pemerintah untuk

menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat khususnya dengan pemberian insentif-insentif perpajakan untuk membantu para wajib pajak yang terdampak, dengan harapan dapat menumbuhkan rasa kesadaran pajak bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga rasa kepatuhan pajak dapat menjadi norma di masyarakat. Kepatuhan Pajak sukarela yang timbul dari kesadaran Wajib Pajak sebagai aktualisasi semangat gotong royong dan solidaritas nasional untuk memulihkan perekonomian Indonesia lebih cepat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga berimbas pada perubahan penyaluran sosialisasi perpajakan dan layanan administrasi kepada Wajib Pajak yang beralih dari sistem tatap muka menjadi full online yang semakin mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban kepatuhan perpajakannya.

Sektor perpajakan Indonesia mayoritas berasal dari sektor ekonomi riil dan diantaranya adalah UMKM, UMKM merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat, keluarga dan/atau perorangan yang merupakan mayoritas pelaku usaha Indonesia (99% proporsi dari total pelaku usaha), dalam hal pajak penghasilan UMKM berdasarkan asas pajak presumtif bahwa penghitungan pajak terutangnya berdasarkan indikator selain penghasilan bersih, tarif tunggal PPh adalah 0,5% dari omzet penjualannya. UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi sekitar 61,41% dari total PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja lokal, dari sisi perpajakan, UMKM masih belum menunjukkan kontribusi yang dominan untuk rasio pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang norma subjektif menurut penelitian (Sudirman et al., 2020) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara meskipun tidak spesifik wajib pajak mana yang peneliti maksudkan dalam penelitiannya, untuk sosialisasi perpajakan (Handayani et al., 2020) juga menemukan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penjual batik di Pasar Klewer Surakarta, dan pelayanan administrasi perpajakan berdasarkan penelitian (Astana & Merkusiwati, 2017) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar Bali. Semua fenomena tersebut di atas menjadi alasan untuk meneliti kepatuhan wajib pajak UMKM dengan tujuan untuk

mengetahui pengaruh norma subjektif, sosialisasi perpajakan dan pelayanan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kanwil DJP Jakarta Utara. Kontribusi penelitian ini adalah untuk memberikan masukan bagi agenda Pemerintah Indonesia ke depan seperti perbaikan pendekatan wajib pajak, regulasi, prosedur dan sistem, dengan perspektif yang mendalam mengenai perilaku pajak UMKM individu dalam rangka meningkatkan rasio pajak secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis pengaruh norma subjektif, sosialisasi perpajakan dan layanan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada Kantor Wilayah Pajak Jakarta Utara.

Berdasarkan informasi yang telah dijabarkan, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Norma Subjektif, Sosialisasi Perpajakan dan Layanan Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang Terdaftar pada Kantor Wilayah Pajak Jakarta Utara”**

2. Identifikasi Masalah

Menurut Mardiasmo (2011) dengan penerapan sistem “self assesment” di Indonesia, Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Dengan penerapan sistem tersebut, kepatuhan pajak bergantung kepada seberapa besar tingkat moral Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dilain pihak, Wajib Pajak justru memanfaatkan celah untuk menutupi harta kekayaan yang sesungguhnya dimiliki. Tingkat kepatuhan pajak memiliki peran penting dalam terealisasinya target penerimaan negara dari sektor perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan negara dari sektor perpajakan. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat Kepatuhan WPOP ialah tingkat Pengetahuan Perpajakan (Zuhdi et al, 2015) dan bagaimana Pemerintah

meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui program Sosialisasi Perpajakan yang merupakan salah satu faktor yang ditekankan oleh Otoritas Pajak. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Arles, 2015).

3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada sampel penelitian yang dibatasi hanya pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan UMKM dan terdaftar di Kanwil Jakarta Utara.

4. Perumusan Masalah

Beberapa permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Norma Subjektif berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang Terdaftar pada Kantor Wilayah Pajak Jakarta Utara
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang Terdaftar pada Kantor Wilayah Pajak Jakarta Utara.
3. Apakah Layanan Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang Terdaftar pada Kantor Wilayah Pajak Jakarta Utara.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang diuraikan sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang Terdaftar pada Kantor Wilayah Pajak Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang Terdaftar pada Kantor Wilayah Pajak Jakarta Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Layanan Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang Terdaftar pada Kantor Wilayah Pajak Jakarta Utara.

2. Manfaat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang tidak hanya untuk kegunaan akademik, namun diharapkan dapat memberikan kontribusi pula untuk berbagai aspek dan pihak antara lain:

1. Bagi Otoritas Pajak
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi terobosan-terobosan program Otoritas Pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan pelayanan yang sesuai dan tepat sasaran bagi Wajib Pajak, yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada tingkat penerimaan negara dan pembangunan nasional.
2. Bagi Wajib Pajak
Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan menerima hak yang para Wajib Pajak miliki, para Wajib Pajak dalam membayar pajaknya sangat berdampak pada tingkat penerimaan negara, maka semakin tinggi penerimaan negara, akan semakin tinggi dan dapat lebih merata pula pembangunan yang akan dirasakan seluruh Warga Negara Indonesia, yang mana hal ini akan meningkatkan taraf kehidupan Warga Negara Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, juga sarana penambah informasi dan pengetahuan dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjari, D. (2004). PARTIAL LEAST SQUARES: ANOTHER METHOD OF STRUCTURAL EQUATION MODELING ANALYSIS. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* (Vol. 19, Issue 3).
- Ajzen, I. (1991). Organizational Behavior and Human Decision Processes. *The Theory of Planned Behavior*, 179–211.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arviana, N., & Indrajati, D. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 2(No. 1), 146–154.
- Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 18(No.1), 818–846.
- Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. Modern Methods for Business Research*.
- Cooper, Donald, & Schindler. (2006). *Business research methods* (9th ed.). Mc Graw-Hill.
- Cooper, & Schindler. (2011). *Business research methods* (11th ed.). McGraw Hill Companies.
- Darussalam, D. R., & Septriadi, D. (2008). *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*. PT Dimensi Internasional Tax.
- Dharmawan, Y. E., & Adi, P. H. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i2.35699>
- Fidel. (2008). *Pajak Penghasilan*. Carofin Publishing.
- Finrely, C., & Ardiansyah. (2022). Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Melalui Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4365–4374. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3716>

- Fornell, C., & Larcker, David. F. (1981). 'Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, Vol. 18(No. 1), 39–50.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least squares: Konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan program smart PLS 3.0*. Universitas Diponegoro.
- Hair et. al. (2008). *Multivariate Data Analysis (6th ed) Eaglewood Cliffs*. Pearson Prentice Hall.
- Hair et. al. (2011). *Multivariate Data Analysis (7th ed.)*. Pearson Prentice Hall.
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. 16(No. 1), 22–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4406>
- Hassan, S. S. (2010). *Tax Audit Techniques in Cash Based Economies: A Practical Guide*. Commonwealth Secretariat.
- Jogiyanto. (2008). *Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi.
- Jogiyanto. (2009). *Sistem Informasi Manajemen*. Andi.
- Kircher, E. E. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology*, Vol. 29(No. 2), 210–225.
- Marceline, M., & Yuniarwati. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Palmerah. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, Vol. 1(No. 2), 460–467. <https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.5015>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM E-COMMERCE. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 16(No. 1), 21–29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Michener, H. A., Delamater, J. D., & Myers, D. J. (2004). *Social Psychology 5. United States. Thomson Learning, Inc.*

- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1–42.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor.
- Robbins, S. (2015). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Sarwono, J., & Narimawati, U. (2015). *Membuat Skripsi, Tesis, dan Disertasi dengan Partial Least Square SEM (PLS-SEM)*. Andi Offset.
- Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. *Methods of Psychological Research Online*, 8(2), 23–74.
- Sedarmayanti. (2017). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)* (S. A. Mifka, Ed.; Cetakan 4). Refika Aditama.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (Seventh). John Wiley & Sons Ltd.
- Sopnar, L. (1997). *Akuntansi Pajak*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering. (2020). PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, KEWAJIBAN MORAL DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA. *Jurnal Riset Perpajakan*, Vol. 3(No. 2), 164–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet.
- Tandean, V. A., & Jonathan. (2016). *PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI*. www.idx.co.id
- Toshiyuki, F. (2001). *Administrasi Perpajakan yang Semestinya (Semoga Administrasi di Indonesia Berkembang)*. Japan International Cooperation Agency.
- Uce, I. (2013). *Penulisan Karya Ilmiah, Panduan Awal Menyusun Skripsi Dan Tugas Akhir*. Salemba Empat.
- Winerungan, O. L. (2013). SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KPP MANADO DAN KPP BITUNG. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen,*

- Bisnis Dan Akuntansi*, 1(No. 3), 960–970.
<https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2301>
- Worthington, R. L., & Whittaker, T. A. (2006). Scale Development Research: A Content Analysis and Recommendations for Best Practices. *The Counseling Psychologist*, Vol. 34(No. 6), 806–838.
- Yusril, M., Handayani, S. R., & Nuzula, N. F. (2015). PENGARUH ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN FISKUS, TERHADAP PERILAKU WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada wajib pajak Badan di kantor pelayanan pajak Malang Selatan) 1). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 9(No. 2), 35–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.profit.2015.009.02.4>